

Comparison of Party Systems and Election: Old and New Order Political Parties in Indonesia

Perbandingan Sistem Kepartaian dan Pemilu: Partai Politik Orde Lama dan Baru di Indonesia

Arlis Prayugo ✉, **Helena Christine Dora**

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Jakarta, Indonesia

✉ arlisyugo@yahoo.com

Submit: 27-06-2024

Revisi: 22-12-2024

Diterima: 23-12-2024

ABSTRACT

The political history of Indonesia encompasses the Old Order and the New Order, with significant differences in the party system and elections. The Old Order shows political pluralism with many active parties, while the New Order focuses more on stability by reducing the number of parties. Political dynamics and external factors such as the dominance of major parties and candidate selection strategies also influence the relationship between the party system and elections in Indonesia. This research aims to compare the party system and electoral processes between Political Parties in the Old Order and New Order eras in Indonesia. The research method used is a comparative analysis based on historical data and related literature. The research findings show that during the Old Order era marked by President Soekarno's government, Indonesia's party system was dominated by the Indonesian National Party (PNI). Elections during this time also had unique characteristics reflecting the political power of the PNI in controlling the national political process. On the other hand, the New Order era under President Soeharto's government showed different dynamics in the party system and elections. Golkar, as the ruling party, had strong dominance in the party system. Elections during the New Order era tended to be tightly controlled to maintain established political power. Comparing the party system and elections in these two periods provides profound insights into Indonesia's political evolution. This research is expected to make a significant contribution to our understanding of political dynamics and changes in Indonesia's political system over time, as well as the implications of the party system and elections for democracy building, political stability, and political representation in Indonesia.

Keywords: party system, elections, old order, new order



ABSTRAK

Sejarah politik Indonesia meliputi Orde Lama dan Orde Baru, dengan perbedaan signifikan dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Orde Lama menunjukkan pluralisme politik dengan banyaknya partai aktif, sementara Orde Baru lebih fokus pada stabilitas dengan mengurangi jumlah partai. Dinamika politik dan faktor eksternal seperti dominasi partai besar dan strategi pemilihan calon juga memengaruhi hubungan antara sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem kepartaian dan proses pemilihan umum (Pemilu) antara Partai Politik pada era Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif berdasarkan data historis dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Orde Lama yang ditandai dengan pemerintahan Presiden Soekarno, sistem kepartaian Indonesia mengalami dominasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Pemilihan umum pada masa ini juga memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekuatan politik PNI dalam mengontrol proses politik nasional. Di sisi lain, era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan dinamika yang berbeda dalam sistem kepartaian dan Pemilu. Golkar, sebagai partai penguasa, memiliki dominasi yang kuat dalam sistem kepartaian. Pemilihan umum pada masa Orde Baru cenderung terkontrol dengan ketat untuk mempertahankan kekuasaan politik yang mapan. Perbandingan antara sistem kepartaian dan Pemilu pada kedua periode ini memberikan wawasan mendalam tentang evolusi politik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang dinamika politik dan perubahan sistem politik Indonesia dari masa ke masa, serta implikasi sistem kepartaian dan Pemilu terhadap pembangunan demokrasi, stabilitas politik, dan representasi politik di Indonesia.

Kata kunci: sistem kepartaian, pemilu, orde lama, orde baru

PENDAHULUAN

Negara-negara di seluruh dunia memiliki partai politik sebagai elemen kunci dalam sistem pemerintahan, termasuk negara-negara yang masih berkembang. Partai-partai ini dianggap penting dalam membangun sistem politik yang demokratis, di mana aspirasi beragam dari rakyat dapat diwakili secara proporsional melalui proses pemilihan umum. Tujuan utama dari politik partai adalah menciptakan negara sejahtera sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Namun, pada banyak kasus terutama di negara-negara berkembang,

kehadiran partai politik sering kali berdampak negatif dengan mengakibatkan pemerintahan yang tidak efektif, *inefisien*, bahkan sering kali menyebabkan kekacauan. Berbeda dengan negara maju yang memiliki sistem kepartaian yang stabil, seperti yang terlihat di Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki dua partai dominan, atau di negara-negara seperti Italia dan Perancis yang memiliki beberapa partai utama.¹

Di Indonesia, sistem kepartaian memiliki sejarah yang panjang. Setelah masa revolusi, terjadi lonjakan jumlah partai politik yang mengakibatkan ketidakstabilan di berbagai sektor. Reformasi dalam sistem kepartaian dimulai pada masa Orde Baru dengan menggabungkan beberapa partai menjadi entitas yang lebih kuat dan mengurangi kekuatan partai dengan *floating mass* melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975. Meskipun demikian, pada tahun 1999, jumlah partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum mencapai 48 partai.²

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Ini adalah mekanisme yang vital dalam menentukan legitimasi kekuasaan, di mana partai politik bertarung untuk memenangkan dukungan rakyat melalui suara yang diberikan dalam pemungutan suara.

Di Indonesia, hubungan antara sistem kepartaian dan pelaksanaan Pemilu sering kali tidak selaras atau sejalan. Terdapat dinamika kompleks yang mempengaruhi interaksi antara kedua aspek ini. Salah satunya adalah perubahan dalam undang-undang pemilu yang mengatur berbagai aspek teknis dan substansial terkait proses pemilihan umum. Perubahan ini dapat mencakup hal-hal seperti sistem perwakilan, batas ambang batas untuk partai politik, proses kampanye, pembiayaan politik, dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Perubahan-perubahan ini dapat membentuk lanskap politik yang berbeda dalam setiap pemilihan umum dan mempengaruhi strategi dan taktik partai politik dalam meraih suara. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait partai politik juga memainkan peran penting dalam dinamika pemilu. Kebijakan seperti pembatasan jumlah partai politik, persyaratan untuk mengikuti pemilu, dukungan dari lembaga-lembaga tertentu, dan aturan terkait keanggotaan partai dapat berdampak signifikan pada keseluruhan proses pemilihan umum.

¹ Djohermansyah Djohan & Karyana, "Sistem Kepartaian Dan Pemilu" (Jakarta: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, 2014), 1–24, <https://repository.ut.ac.id/4229/>.

² Alfian Muhazir, *Product Image Product Image Product Image Komunikasi Politik Demokrasi, Media Massa, Dan Pemilihan Umum Di Indonesia* (Zahira Media Publisher, 2021).

Pada awalnya, sistem Pemilu yang menggunakan sistem perwakilan proporsional dan daftar calon pernah mempengaruhi perkembangan partai politik dengan mendorong lahirnya banyak partai politik. Namun, pada Pemilu-Pemilu berikutnya dengan sistem yang sama, dampak tersebut tidak lagi terjadi. Selain itu, ada contoh di mana Pemilu tidak mampu menghasilkan mayoritas di parlemen, seperti pada Pemilu tahun 1955. Namun, pada Pemilu-Pemilu selanjutnya di bawah pemerintahan Orde Baru, mayoritas parlemen selalu berhasil terbentuk (melalui Golkar).³

Sejarah politik Indonesia mencakup dua periode kunci, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Kedua periode ini memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal sistem kepartaian dan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Pada masa Orde Lama, terdapat karakteristik sistem kepartaian yang pluralis, di mana banyak partai politik aktif beroperasi. Hal ini mencerminkan dinamika politik yang heterogen dan beragam. Di sisi lain, pada masa Orde Baru, terjadi perubahan signifikan dengan upaya untuk mengurangi jumlah partai politik. Langkah ini diambil dengan tujuan mencapai stabilitas politik yang lebih besar.

Selama era Orde Lama, keberagaman partai politik mencerminkan kondisi politik yang dinamis dan penuh dengan pluralisme. Banyaknya partai politik yang aktif menunjukkan keragaman pandangan politik dan aspirasi dari berbagai segmen masyarakat. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam mencapai konsensus politik yang kuat dan membuat keputusan yang efisien. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, terjadi perubahan arah dengan fokus pada pembentukan sistem politik yang lebih terpusat. Langkah-langkah dilakukan untuk mengurangi jumlah partai politik dengan harapan menciptakan stabilitas politik yang lebih besar. Meskipun tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas, pendekatan ini juga memicu debat tentang pluralisme politik dan representasi yang seimbang dalam sistem politik.

Dinamika politik internal dalam masing-masing periode juga menjadi faktor penting dalam memahami hubungan antara sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Periode Orde Lama, misalnya, ditandai dengan keberagaman partai politik yang aktif, sementara Orde Baru cenderung mengurangi jumlah partai politik untuk mencapai stabilitas politik yang diinginkan.⁴ Faktor-faktor seperti adanya partai-partai besar yang mendominasi, aliansi antar partai, strategi pemilihan calon, dan dinamika politik nasional dan regional juga menjadi

³ Djohermansyah Djohan & Karyana, "Sistem Kepartaian Dan Pemilu."

⁴ Jihan Amalia Syahidah, *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, ed. M.H Dr. Erie Hariyanto (Pamekasan, Madura: Duta Media Publishing, 2021).

pertimbangan penting dalam menganalisis hubungan antara sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam perbandingan antara sistem kepartaian dan pelaksanaan Pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan di kedua periode ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika politik Indonesia dan bagaimana sistem kepartaian serta Pemilu mempengaruhi proses demokrasi dan stabilitas politik di negara ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif dan interpretatif terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada pemahaman konteks, makna, dan pengalaman yang dialami oleh partisipan atau subjek penelitian⁵. Dalam penelitian kualitatif, fokus utamanya adalah pada interpretasi, pemahaman konteks, dan makna dari data yang diperoleh dari literatur. Pendekatan *literature review* memungkinkan peneliti untuk menyusun ulang informasi yang ada, menemukan pola, kesamaan, perbedaan, dan kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai sumber literatur yang telah ada. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi sumber literatur yang relevan, evaluasi kredibilitas dan relevansi sumber, sintesis informasi dari berbagai sumber untuk membangun kerangka pemahaman, dan analisis terhadap temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan *literature review* dalam penelitian kualitatif memberikan landasan yang kuat untuk memahami konteks teoritis, mendalami pemahaman terhadap topik, dan mengarahkan penyelidikan lebih lanjut. Data yang dikumpulkan dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metodologi Miles dan Huberman. Miles dan Huberman memberikan prosedur empat langkah untuk analisis data kualitatif, yang mereka gambarkan sebagai aktivitas yang berkelanjutan dan dinamis. Menurut Sugiyono,⁶ proses analisis data ada empat langkah, yaitu: mengumpulkan, mereduksi, menampilkan, dan membuat kesimpulan serta memverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2020).

⁶ Sugiyono (2020).

Sistem Kepartaian Partai Politik Orde Lama dan Orde Baru

Sistem kepartaian pada masa Orde Lama di Indonesia ditandai oleh keberagaman partai politik yang aktif dan berperan dalam proses politik. Era ini dimulai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga sekitar pertengahan tahun 1960-an. Beberapa ciri utama dari sistem kepartaian Orde Lama adalah:

Pertama, pluralisme partai politik, pluralisme partai politik di Indonesia telah menjadi ciri yang mencolok sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Berbagai partai politik seperti PNI dengan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan, Masyumi yang memperjuangkan suara Islam politik, PKI yang meskipun dilarang masih memegang pengaruh, dan NU yang menjadi representasi Islam moderat, semuanya menunjukkan keberagaman ideologi dan basis dukungan yang kuat di tengah dinamika politik Indonesia.⁷ Hal ini menggambarkan kehidupan politik negara yang kompleks dengan peran beragam dari berbagai partai politik yang aktif.

Kedua, peran sentral dalam politik, peran sentral partai politik besar, seperti yang terlihat pada Partai Nasional Indonesia (PNI) di era Soekarno, menandai sejarah politik Indonesia dengan dominasi dan pengaruhnya dalam pembentukan pemerintahan serta arah kebijakan nasional. Sebagai salah satu partai politik terbesar pada masa kemerdekaan, PNI dan partai lainnya seperti Masyumi memegang peran dominan dalam politik nasional, terutama di bawah kepemimpinan Soekarno yang aktif mengarahkan pemerintahan.⁸ Peran sentral ini tergambar dalam pengambilan keputusan politik strategis, pembentukan koalisi, dan pengarahannya kebijakan nasional, menunjukkan bahwa partai-partai besar memiliki kekuatan yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan negara. Meskipun begitu, dinamika politik Indonesia juga mencakup peran partai-partai lain yang berubah seiring perkembangan politik dan perubahan pemerintahan, menambah kompleksitas dalam proses pembentukan kebijakan dan koalisi politik.

Ketiga, dinamika politik bersifat terbuka, dinamika politik yang terbuka di Indonesia mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik tanpa terhalang oleh ketegangan antarpolisi. Partisipasi publik yang lebih terbuka, melalui pemilihan umum, kampanye politik, dan platform daring, memfasilitasi

⁷ Muhsin Aseri, *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)*, ed. Ahmad Juhaidi (Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/14689/>.

⁸ G. Argenti, "Ideologisasi Partai Islam Masyumi Di Indonesia," *Jurnal Politikom Indonesiana* 5 (2020): 37–57, https://www.researchgate.net/publication/342706204_Ideologisasi_Partai_Islam_Masyumi_di_Indonesia.

pertukaran pendapat politik tanpa takut akan represi. Transparansi politik, diperkuat oleh media massa dan media sosial, menjadi bagian integral dari dinamika politik yang terbuka. Ini memberikan kesempatan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan aktivis, untuk terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan negara.⁹ Meskipun terdapat ketegangan politik, dinamika politik yang terbuka penting untuk menjaga keberagaman pandangan politik dan mendorong partisipasi demokratis yang inklusif.

Keempat, pada masa Orde Lama di Indonesia terjadi perkembangan ideologi yang mencerminkan keberagaman pandangan politik dalam masyarakat. Partai-partai politik mewakili spektrum ideologi yang luas, seperti nasionalisme, Islamisme, sosialisme, dan komunisme. Nasionalisme ditegaskan oleh partai seperti PNI, sementara Islamisme tercermin dalam partai seperti Masyumi. Sosialisme menekankan kesetaraan sosial, sedangkan komunisme, meskipun dilarang pada masa Orde Baru, juga memiliki pengaruh.¹⁰ Perkembangan ini mencerminkan dinamika politik kompleks dan keberagaman pandangan dalam masyarakat Indonesia, membentuk kerangka politik dan pembangunan negara yang beragam.

Sistem kepartaian pada masa Orde Baru di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin penting terkait sistem kepartaian pada era Orde Baru:

Pertama, ketegasan kepemimpinan, pada masa Orde Baru, Soeharto memimpin dengan tegas dalam sistem politik Indonesia. Kekuasaan sangat terpusat pada presiden, mengendalikan semua aspek kebijakan termasuk politik, ekonomi, dan sosial, serta sektor-sektor seperti militer dan birokrasi. Dominasi Soeharto dalam pengambilan keputusan politik memengaruhi Golkar dan partai politik lainnya yang kurang memiliki otonomi. Loyalitas pada kepemimpinan Soeharto dianggap krusial, sementara kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada konsekuensi hukum atau politik. Hierarki yang ketat menjadikan elite politik dan ekonomi sekitar presiden memiliki kontrol penuh atas keputusan politik, dengan sedikit ruang bagi partisipasi politik dari pihak lain.¹¹ Dinamika ini mencerminkan dominasi otoriter, kendali penuh terhadap keputusan politik, dan hierarki kuat di struktur kekuasaan, berbeda dengan era sebelumnya yang lebih terbuka.

⁹ Djohermansyah Djohan & Karyana, "Sistem Kepartaian Dan Pemilu."

¹⁰ Djohermansyah Djohan & Karyana.

¹¹ Bob Samuel, "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016," *UNDIP*, 2019, 1–12, [ejournal3.undip.ac.id › index › jpgs](http://ejournal3.undip.ac.id/index/jpgs).

Kedua, partai tunggal, partai tunggal Golkar dalam Orde Baru adalah simbol dominasi politik yang terpusat. Dengan dukungan luas pemerintah, Golkar mendominasi politik, mengonsolidasikan kekuasaan rezim, menjaga kesatuan ideologi, dan mengendalikan pemilu serta hubungan dengan elit politik dan ekonomi. Namun, keterbatasan dalam menerima kritik mengurangi dialog politik yang kritis.¹² Golkar mencerminkan kurangnya pluralitas dalam sistem politik, memengaruhi dinamika politik dan partisipasi masyarakat.

Ketiga, Pengendalian politik, pada masa Orde Baru pemerintah menerapkan pengendalian politik ketat untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan rezim. Pengendalian ini mencakup regulasi ketat terhadap partai politik dan organisasi massa seperti PPP dan PDI, dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas politik, pertemuan publik, dan media massa.¹³ Selain itu, pemerintah memiliki kontrol kuat terhadap kepemimpinan partai, menggunakan manipulasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, serta membatasi dialog politik dan pertukaran ide secara terbuka. Hal ini menciptakan lingkungan politik yang kurang pluralistik dan terbuka, memengaruhi partisipasi politik, pembentukan opini publik, dan dinamika politik secara keseluruhan, dengan pemerintah memiliki kendali besar atas arah politik negara.

Keempat, pengaruh militer, pada masa Orde Baru militer memiliki peran penting dalam politik, terutama dalam pengambilan keputusan strategis terkait pertahanan dan keamanan nasional. Hubungan erat militer dengan partai politik seperti Golkar memengaruhi keputusan politik dan kebijakan negara. Militer sering intervensi dalam penanganan konflik politis dan sosial untuk menjaga stabilitas negara. Militer memiliki kendali atas sumber daya penting dan proyek infrastruktur, memberikan mereka pengaruh ekonomi yang besar. Meskipun resmi terpisah, militer memengaruhi kebijakan-kebijakan terkait keamanan nasional dan stabilitas politik. Keterlibatan militer yang berlebihan dapat menghambat perkembangan demokrasi dan partisipasi politik yang inklusif.¹⁴ Pengaruh militer menciptakan dinamika politik kompleks dengan interaksi antara kepentingan politik, keamanan nasional, dan stabilitas negara, penting dalam memahami sistem politik pada masa Orde Baru.

¹² M. Ariffin, "Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan Di Masa Orde Baru," *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 5, no. 12–22 (2019) <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/article/view/6084>.

¹³ Yusa Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru," *JURNAL ADHIKARI* 1 (2022): 152–61.

¹⁴ Helda Risman Syamsul Hilal, Afrizal Hendra, Tri Legionosuko, "Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya pada Masa Depan NKRI," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3539–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1383>.

Kelima, ketidakseimbangan kekuasaan, pada masa Orde Baru, sistem kepartaian menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan politik yang memengaruhi partai oposisi. Mereka menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengaruh dalam kebijakan negara, kendala hukum dan administratif, pengawasan serta intimidasi, kontrol sumber daya, minimnya dialog politik, dan ketergantungan pada kritik eksternal.¹⁵ Dampaknya tidak hanya terbatas pada dinamika politik, tetapi juga partisipasi politik masyarakat dalam proses pembangunan negara.

Keenam, perubahan struktur, pada awal era Orde Baru terjadi perubahan signifikan dalam struktur partai politik di Indonesia, yang mencakup penggabungan partai dan pembentukan partai baru. Penggabungan seperti PPP-Murba dan pembentukan partai baru seperti PDI menghadirkan dinamika politik yang lebih kompleks dan beragam.¹⁶ Perubahan ini bertujuan untuk menghadapi dominasi pemerintah Orde Baru, namun juga memicu reaksi dan strategi politik yang menjadi faktor penting dalam membentuk pola politik pada masa tersebut.

Sistem kepartaian Orde Lama merupakan periode yang penting dalam sejarah politik Indonesia karena menggambarkan keragaman politik dan ideologi yang mempengaruhi pembentukan negara dan sistem politik nasional, sedangkan sistem kepartaian Orde Baru mencerminkan karakteristik pemerintahan otoriter yang mengendalikan sebagian besar aspek politik negara. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana politik di Indonesia berlangsung pada masa tersebut, dengan dominasi politik yang sangat terpusat dan keterbatasan partisipasi politik dari berbagai pihak. Perbandingan sistem kepartaian pada masa Orde Lama dan Orde Baru ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Kepartaian Masa Orde Lama dan Orde Baru

No.	Aspek	Orde Lama	Orde Baru
1	Penggabungan Partai	Partai-partai besar mengalami penggabungan untuk membentuk kekuatan politik yang lebih besar. Contoh: PNI-Masyumi.	Pemerintah menggalakkan pembentukan partai tunggal (Golkar) sebagai kekuatan politik dominan.

¹⁵ Yusa Farchan, "Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru."

¹⁶ Yusa Farchan.

2	Ideologi Partai	Beragam ideologi dari nasionalisme, Islamisme, sosialisme, hingga komunisme, mewarnai spektrum partai politik.	Ideologi Pancasila menjadi landasan tunggal bagi partai politik, dengan penekanan pada "kesatuan" dan "stabilitas".
3	Peran Militer	Memiliki pengaruh politik yang signifikan, terutama dalam pembentukan pemerintahan dan kebijakan nasional.	Tetap memiliki peran strategis, namun lebih terfokus pada stabilitas politik dan pengendalian keamanan.
4	Kendala Terhadap Oposisi	Terdapat kendala hukum dan administratif yang membatasi aktivitas politik partai oposisi.	Partai-partai oposisi sering kali diawasi dan diintimidasi, dengan pengaruh yang terbatas dalam politik nasional.
5	Ruang Dialog Politik	Terbuka untuk dialog dan diskusi politik yang beragam, meskipun dengan ketegangan antarpantai.	Minimnya ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan oposisi, dengan dominasi wacana politik pemerintah.

Pemilu Masa Orde Lama dan Orde Baru

Jalannya pemilu pada masa Orde Lama (1950-1966) dan Orde Baru (1966-1998) di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal proses, partisipasi publik, kontrol politik, dan dampaknya terhadap dinamika politik nasional. Berikut adalah gambaran umum tentang jalannya pemilu pada kedua periode tersebut:

1. Pemilu pada Masa Orde Lama (1950-1966)

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 setelah merdeka dari Belanda. Periode ini ditandai dengan pluralisme politik yang kuat, di mana berbagai partai politik dengan ideologi dan basis dukungan yang beragam berpartisipasi dalam pemilu. Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer pada masa itu, di mana pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dilakukan secara terpisah. Partai-partai politik bersaing dalam pemilihan umum untuk mendapatkan kursi di parlemen dan mempengaruhi pembentukan pemerintahan. Masyarakat umum, termasuk pemilih baru yang baru merasakan

hak suara mereka, aktif terlibat dalam pemilu. Kampanye politik dilakukan secara terbuka dan partisipasi publik dalam debat politik dan pemilihan dianggap penting.¹⁷ Pemilu pada masa Orde Lama mencerminkan kontestasi politik yang beragam antara partai-partai politik dengan visi dan program yang berbeda. Ideologi politik, seperti nasionalisme, demokrasi sosial, dan Islamisme, menjadi faktor penting dalam pemilihan umum.

2. Pemilu pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, terutama setelah 1971, Golkar menjadi partai dominan yang mendominasi pemilu dan proses politik. Meskipun terdapat partai oposisi, Golkar memiliki keunggulan yang signifikan dalam sumber daya, akses ke media massa, dan dukungan pemerintah. Partai oposisi sering menghadapi kendala yang signifikan dalam kontestasi pemilu, mulai dari hambatan administratif, regulasi yang menguntungkan Golkar, hingga intimidasi politik dan pengawasan ketat dari aparat keamanan. Terdapat dugaan manipulasi hasil pemilu pada masa Orde Baru, baik melalui penggunaan kekuasaan politik untuk memengaruhi pemilih maupun melalui praktik-praktik tidak jujur dalam penghitungan suara. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keabsahan hasil pemilu. Media massa dan informasi sangat terkendali oleh pemerintah dan partai penguasa, yang memengaruhi cara pemilih mendapatkan informasi tentang calon dan partai politik.¹⁸ Kontrol ini juga mencerminkan upaya untuk mengontrol narasi politik yang disampaikan kepada publik.

Perbandingan pemilu antara masa Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia mengungkap perbedaan signifikan, yaitu: (1) Orde Lama menawarkan demokrasi pluralistik, sedangkan Orde Baru didominasi oleh Golkar, mengurangi pluralisme politik, (2) Orde Lama aktif dalam debat politik, berbeda dengan Orde Baru yang mengalami kendala intimidasi politik dan kontrol media, (3) Pada Orde Baru, partai oposisi menghadapi hambatan administratif, manipulasi hasil pemilu, dan kendali media, mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilu, (4) Orde Lama lebih pluralistik, sementara Orde Baru menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu dan kontestasi politik yang sehat. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa jalannya pemilu pada masa Orde Lama cenderung lebih terbuka dan pluralistik, sementara pada masa Orde Baru, terdapat kendala-kendala yang membatasi kontestasi politik yang sehat dan adil. Evolusi ini mencerminkan perubahan kompleks dalam sistem politik Indonesia,

¹⁷ Arif Sugitanata et al., "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA: ANTARA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN" 2, no. 1 (2021): 1–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>.

¹⁸ Sugitanata et al.

mempengaruhi demokratisasi, partisipasi publik, dan kepercayaan terhadap integritas pemilu.

KESIMPULAN

Perbandingan sistem kepartaian antara masa Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada masa Orde Lama, terjadi penggabungan partai besar untuk kekuatan politik lebih besar, sementara di Orde Baru, muncul dominasi partai tunggal (Golkar). Ideologi partai juga berubah, dari beragamnya pada Orde Lama menjadi satu landasan tunggal Pancasila di Orde Baru. Peran militer mengalami pergeseran fokus dari pengaruh politik ke stabilitas dan keamanan. Kendala bagi oposisi juga berubah, dari hambatan administratif pada Orde Lama menjadi pengawasan ketat dan intimidasi di Orde Baru. Ruang dialog politik juga terbatas pada Orde Baru, sementara Orde Lama masih memungkinkan diskusi antar partai dengan ketegangan.

Pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan. Orde Lama ditandai dengan pluralisme politik kuat dan partisipasi publik aktif dalam sistem demokrasi parlementer. Sementara itu, Orde Baru ditandai oleh dominasi Golkar yang menghadirkan kendala bagi oposisi, manipulasi hasil pemilu, dan kontrol politik yang lebih ketat terhadap media massa. Dari perbandingan ini, Orde Lama lebih cenderung terbuka dan pluralistis, sedangkan Orde Baru memiliki kendala-kendala yang membatasi kontestasi politik yang sehat dan adil.

REFERENSI

- Argenti, G. "Ideologisasi Partai Islam Masyumi Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana* 5 (2020): 37–57. https://www.researchgate.net/publication/342706204_Ideologisasi_Partai_Islam_Masyumi_di_Indonesia.
- Ariffin, M. "Sejarah Konflik Partai Persatuan Pembangunan Di Masa Orde Baru." *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 5, no. 12–22 (2019). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/article/view/6084>.
- Aseri, Muhsin. *Hukum Islam di Indonesia (Politik Hukum Orde Lama Hingga Reformasi)*. Edited by Ahmad Juhaidi. Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, 2020. <https://idr.uin-antasari.ac.id/14689/>.
- Djohermansyah Djohan & Karyana. "Sistem Kepartaian Dan Pemilu," 1–24. Jakarta: Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas

- Terbuka, 2014. <https://repository.ut.ac.id/4229/>.
- Muhazir, Alfian. *Product Image Product Image Product Image Komunikasi Politik Demokrasi, Media Massa, Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Zahira Media Publisher, 2021.
- Samuel, Bob. “Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016.” *UNDIP*, 2019, 1–12. [ejournal3.undip.ac.id › index › jpgs](http://ejournal3.undip.ac.id/index/jpgs).
- Sugitanata, Arif, Abdul Majid, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia : Antara Orde Lama , Orde Baru Dan” 2, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2020.
- Syahidah, Jihan Amalia. *Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Edited by M.H Dr. Erie Hariyanto. Pamekasan, Madura: Duta Media Publishing, 2021.
- Syamsul Hilal, Afrizal Hendra, Tri Legionosuko, Helda Risman. “Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya pada Masa Depan NKRI.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3539–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1383>.
- Yusa Farchan. “Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru.” *JURNAL ADHIKARI* 1 (2022): 152–61.